



PERTUMBUHAN PERKAMPUNGAN KUMUH DI INDONESIA

¹ Siti Zubaidah¹; ²Irvan Arif Kurniawan;

¹Ilmu Administrasi Negara, STIA Bala Putra Dewa Palembang, Palembang, Indonesia

¹Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

²Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email : siti39196@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan kampung kumuh di Indonesia. Kemunculan permukiman kumuh di berbagai kota disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakseimbangan antara tingkat urbanisasi dengan ketersediaan lahan perumahan. Disamping itu kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan permukiman yang layak huni, pengelolaan tata ruang yang tidak teratur, kurangnya kepedulian masyarakat dalam mendirikan bangunan sesuai standar berlaku, serta lemahnya pengawasan dalam izin mendirikan bangunan berdampak terhadap rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Salah satu intervensi kebijakan dalam mengatasi kampung kumuh dilaksanakan melalui Program Kotaku yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang bersifat kompleks, berbasis pemberdayaan masyarakat. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menganalisis pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan Indonesia dengan menggunakan pemetaan data infografis berdasarkan Wilayah dan Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan Indonesia masih terus meningkat berdasarkan data tahun 2017-2019 terjadi peningkatan mencapai 13.86%. Disamping itu rumah tangga di permukiman kumuh tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan tidak memiliki akses terhadap sanitasi.

Kata kunci : Permukiman Kumuh, Program Kotaku dan Permasalahan sosial

A. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Kajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya melihat pada kondisi fisiknya seperti bangunan yang tidak teratur dengan kualitas konstruksi yang rendah, jalan yang rusak, tidak adanya akses untuk sanitasi layak dan drainase yang tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Sementara kondisi sosial ekonomi dan budaya meliputi tingkat pendapatan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut rendah, norma sosial yang longgar seperti kriminalitas pencurian dan narkoba, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis, Sehingga dari dampak kedua kondisi tersebut mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya (Krisandriyana et al., 2019).

Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi, Secara umum, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya (Wardani et al., 2019).

Kota merupakan suatu tempat pemusatan berbagai kegiatan manusia baik dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan politik dimana berkonsentrasi pada satu tata ruang di atas permukaan (darat) yang memiliki batas-batas wilayah administrasi yang sudah ditetapkan. Kota merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk dengan jumlah yang banyak di atas lahan perkotaan yang terbatas, yang pada umumnya bersifat non agraris. Perkembangan kota tidak selalu menimbulkan dampak positif, namun memiliki dampak negatif diantaranya munculnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kota (Zulkarnaini et al., 2019) (Ridlo, 2020).

Urbanisasi merupakan suatu refleksi adanya perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Dalam hal ini antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan yang mendorong pergerakan penduduk (Hidayati, 2021). Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga menyebabkan rendahnya kualitas permukiman dan kehidupan penghuninya. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang salah satunya dipicu oleh laju urbanisasi (Ervianto, 2019).

Pembangunan daerah saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu dampak dari pembangunan daerah adalah timbulnya urbanisasi. Urbanisasi tidak selamanya membawa dampak baik. Salah satu dampak buruk dari urbanisasi adalah munculnya rumah tidak layak huni (Kusumaningsih et al., 2019).

Orientasi pembangunan saat ini sudah bergeser pada pembangunan yang tidak hanya mementingkan generasi saat ini, namun bagaimana generasi yang akan datang juga tetap mampu bertahan dan berkembang. Kata kunci keberlanjutan atau sustainable kemudian dilekatkan pada usaha pembangunan. Konsep Green City atau Kota Hijau merupakan usaha menerjemahkan konsep kota berkelanjutan dengan mengimplementasikan pembangunan kota yang harus bisa selaras dan ramah dengan lingkungan (Kusumastuti et al., 2021)

Tingkat pertumbuhan penduduk kota yang lebih cepat dan tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di perkotaan, mengakibatkan tekanan penggunaan lahan kota. Salah satunya ditandai dengan penggunaan lahan yang kurang atau tidak layak hunian untuk daerah permukiman. Keadaan yang demikian akan menimbulkan masalah tata ruang/ lingkungan. Utamanya dalam kaitan dengan hal ini adalah semakin pesatnya kemunculan permukiman kumuh di perkotaan (Suharni, 2007).

Fenomena Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya dipicu oleh laju urbanisasi. Pertumbuhan penduduk ini tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu tumbuhnya jumlah

penduduk yang tinggal di daerah kumuh (Krisandriyana et al., 2019). Permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang kurang layak huni. Permukiman kumuh memiliki karakteristik, seperti kepadatan bangunannya yang tinggi, luasan wilayah permukiman yang terbatas, rawan terjadi penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang rendah, dan kurang terlayani sarana dan prasarana yang memadai (Satrio & Sukmawati, 2021).

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim (Krisandriyana et al., 2019).

Rumah deret dibangun dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan rumah deret di Kota Surakarta terhadap kriteria keberlanjutan (Wicaksono et al., 2021). Keadaan rumah penduduk yang hampir tidak memiliki jarak dengan rumah penduduk lainnya, keadaan rumah penduduk setengah dari sample baik dan sisanya buruk yang secara fisik rusak akibat termakan usia (Fadjarani, 2018). Rata penduduk kelurahan kampong bugis tidak memiliki kamar, untuk kebutuhan MCK hingga buang air penduduk masih memanfaatkan sungai dan laut namun ada juga di WC umum. Untuk sumber air penduduk memanfaatkan sumur bor dan air PDAM dengan drainase yang tidak layak pakai (Budiastini, 2015)

Permasalahan perkotaan yang menjadi fokus utama pemerintah dalam menciptakan kawasan permukiman layak huni ialah pemberantasan permukiman kumuh. Masalah permukiman kumuh dapat diatasi dengan adanya penataan permukiman (Wardani et al., 2019). Melalui program Kementerian PUPR dan Kontribusi program Kota ku terhadap peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat serta l untuk mengembangkan perumahan yang layak huni, berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan permukiman yang sehat dan produktif dengan melakukan pengembangan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, persampahan termasuk MCK dan lain sebagainya, sementara pada penguatan jaring pengaman nasional akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran serta mempertahankan daya beli pada pelaksanaan program padat karya tunai serta pemberdayaan dan pembinaan pengusaha lokal yang berfokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi dengan melakukan agenda pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, instrument penelitian di analisis data bersifat kuantitatif/ statistic dan deskriptif sendiri ialah untuk menggambarkan objek penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan lima tahapan diantaranya rumusan masalah, landasan teori, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1



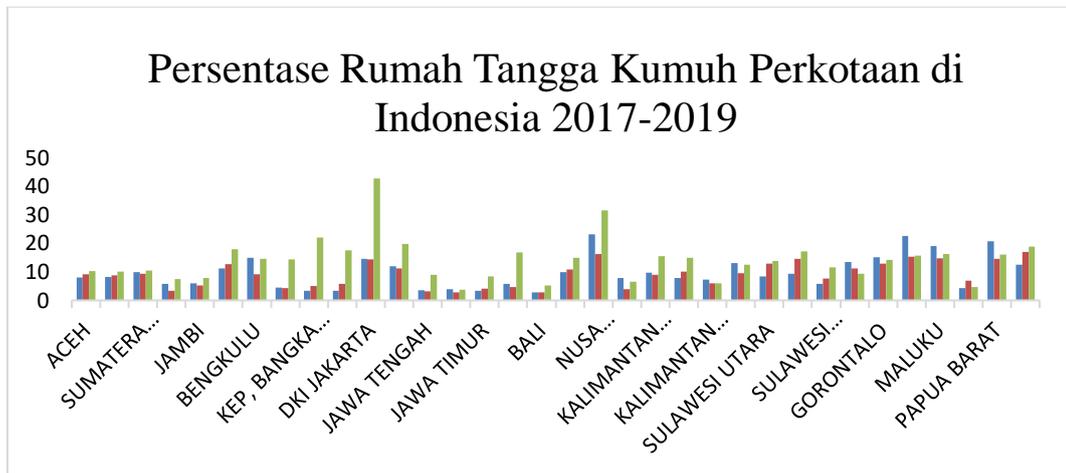
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Deskriptif Kuantitatif

Tahapan dalam pendekatan kuantitatif terlihat pada Gambar 1 dimana proses yang dilakukan dengan melakukan perumusan masalah, melakukan kajian terhadap landasan teori yang relevan berdasarkan permasalahan yang selanjutnya melakukan proses pengumpulan data melalui berbagai sumber. Analisis data dilakukan untuk melihat apakah data yang sudah dikumpulkan sudah cukup untuk memberikan gambaran terhadap objek penelitian sehingga pada proses akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Metode pengumpulan data dalam hal ini penelitian mengambil sampel data infografis permukiman kumuh dari bps.go.id pada tahun 2017-2019. Pada analisa data terlihat sebaran beberapa permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan observasi dari data bps.go.id diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan sampai Papua.

C. HASIL DAN DISKUSI

Pemukiman kumuh terjadi karena beberapa kriteria diantaranya drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpahan air hujan sehingga menimbulkan genangan, sanitasi yang tidak layak, konstruksi bangunan yang tidak sesuai standar serta pengelolaan tata ruang yang tidak teratur. Pencegahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perumahan kumuh terus dilakukan. Adapun berbagai intervensi kebijakan pemerintah melalui program-program percepatan penanganan permukiman kumuh, terlihat dari upaya Program Kota ku yang dilakukan di beberapa Provinsi dan Kota ialah percepatan penanganan permukiman kumuh seperti Provinsi Aceh, Kalimantan, Sumsel, Kota Jakarta dan Kota Bogor memprioritaskan pada pembangunan drainase dan penyediaan sanitasi karena sering terjadinya banjir akibat hujan.

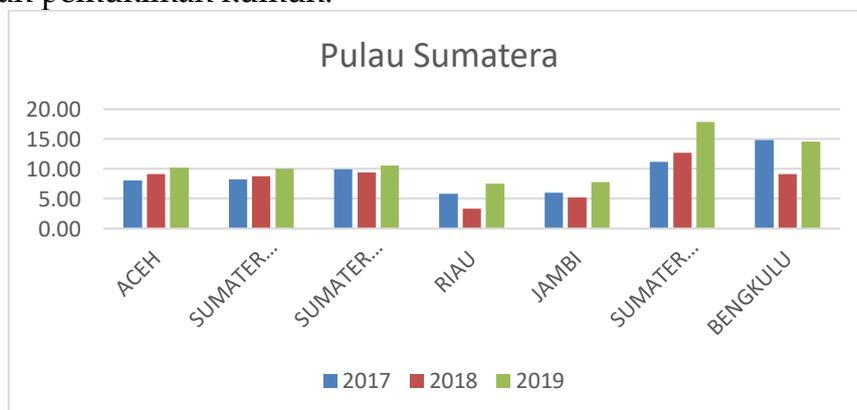
Sementara itu Provinsi DIY dengan angka permukiman kumuh terkecil di seluruh Provinsi di Indonesia yaitu sebesar 3,7% menjadi salah satu *best practice* dalam permasalahan perumahan dan permukiman, Provinsi DIY telah melakukan sinergi dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat khususnya melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.



Pertumbuhan pemukiman kumuh di perkotaan terus bertumbuh terlihat pada data yang telah dikumpulkan dari tahun 2017 - 2019 diseluruh Provinsi Indonesia tingkat pemukiman kumuh semakin tinggi terlebih pada tahun 2019 pertumbuhannya mencapai 13.86%, artinya pemukiman kumuh belum mampu diatasi oleh pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan permukiman kumuh hal ini dirasakan karena kurangnya sinergi yang optimal antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan terdapat data yang digambarkan menggunakan infografis permukiman kumuh pada pulau yang ada di Indonesia diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan sampai Papua.

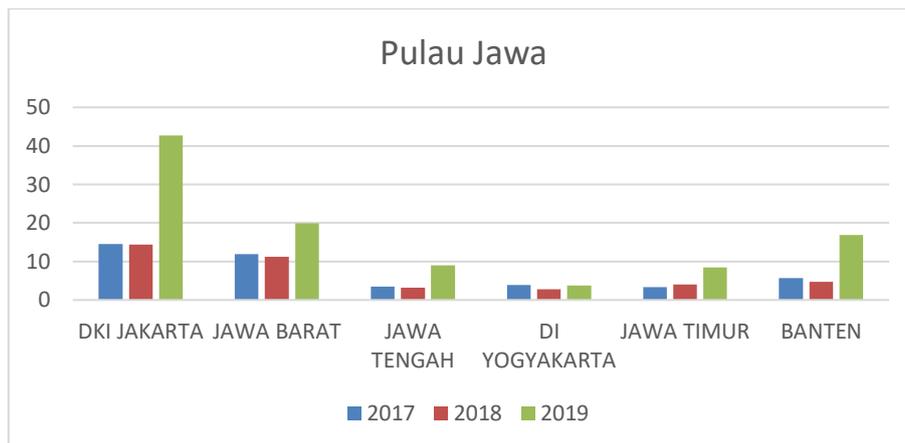
Berdasarkan beberapa data permukiman kumuh yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia maka, permasalahan permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan dengan prioritas penanganan yang harus dilakukan mulai dari melakukan edukasi, sinergi serta melibatkan beberapa pihak mulai dari pemerintah kota, masyarakat serta instansi terkait untuk dapat memberikan edukasi dan pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman kumuh.



Gambar 2. Data Infografis Pemukiman Kumuh
Sumber: bps.go.id

Pada data infografis permukiman kumuh pada Pulau Sumatera terlihat pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan

terbanyak terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 17.87%. Sementara pertumbuhan pada Pulau Jawa terlihat pada Gambar 3.

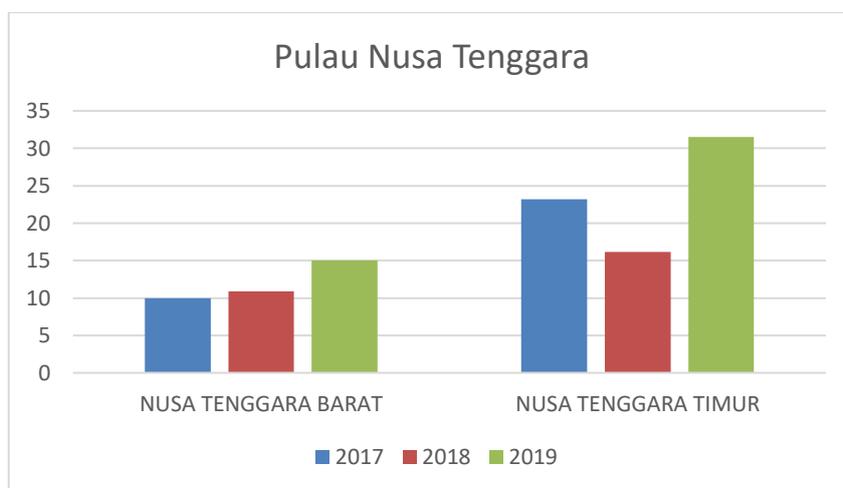


Gambar 3. Data Infografis Pertumbuhan Permukiman Kumuh Pulau Jawa
Sumber: bps.go.id

Berdasarkan pada Gambar 3 terlihat pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan terdapat pada Provinsi DKI Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 42.73 pada tahun 2019, sementara pertumbuhan di DI Yogyakarta hanya sebesar 3.72 merupakan Provinsi yang paling sedikit di Pulau Jawa dengan permukiman kumuh.

Provinsi DIY menjadi salah satu *best practice* dalam permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia dengan melakukan sinergi dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat khususnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, pengusuran dan relokasi.

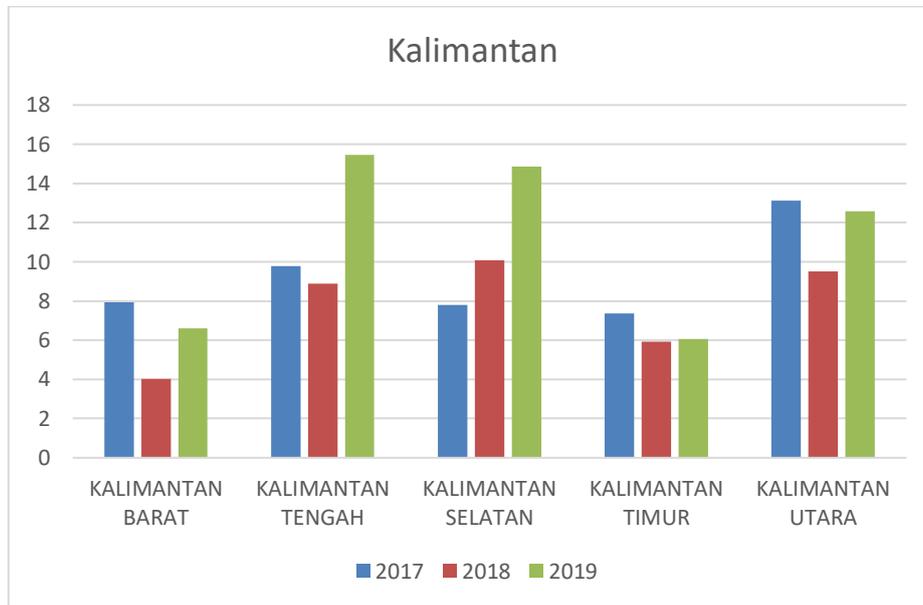
Pada data infografis pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan pada Nusa Tenggara terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Data Infografis Pertumbuhan Permukiman Kumuh di Pulau Nusa Tenggara
Sumber: bps.go.id

Berdasarkan pada data infografis pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan Nusa Tenggara Timur lebih banyak pertumbuhan permukiman kumuh

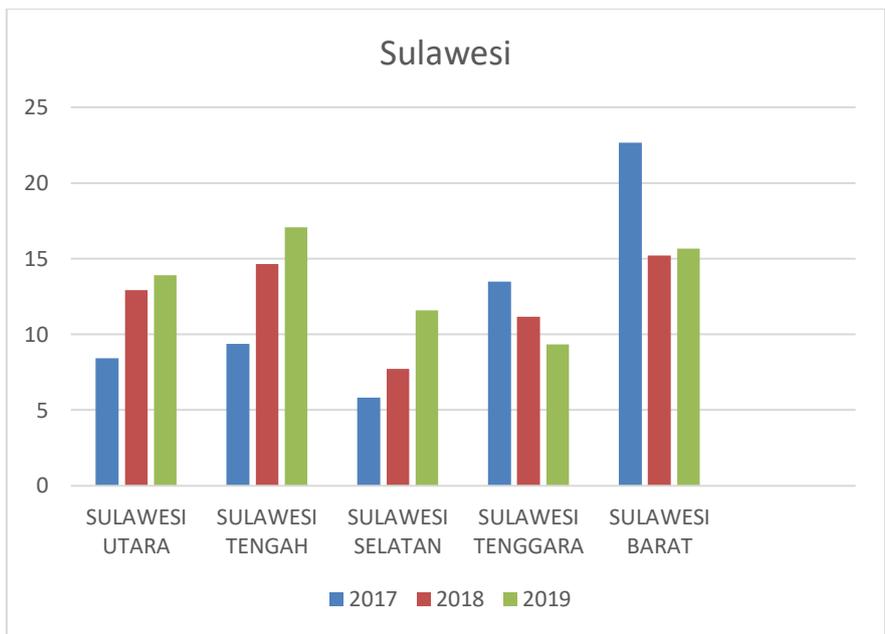
dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat sempat menurun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan 16.15 dari tahun sebelumnya yang mencapai 23.21 pada tahun 2019 pertumbuhan pemukiman kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 31.54. Pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan yang terdapat pada Kalimantan terlihat pada Gambar 5. Dengan beberapa provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara.



Gambar 5. Data Infografis Permukiman Kumuh Kalimantan
Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data infografis pertumbuhan pemukiman kumuh banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada tahun 2019 pertumbuhan sebesar 15.46 dan 14.86. Pemukiman kumuh terjadi karena beberapa kriteria diantaranya drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limbah air hujan sehingga menimbulkan genangan, serta kualitas konstruksi drainase yang buruk. Pencegahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perumahan kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat yang pada saat ini masih terus dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan pemukiman kumuh dan baru terlihat perkembangan pada Provinsi Kalimantan Timur yang pertumbuhan pemukiman kumuh hanya sebesar 6.07.

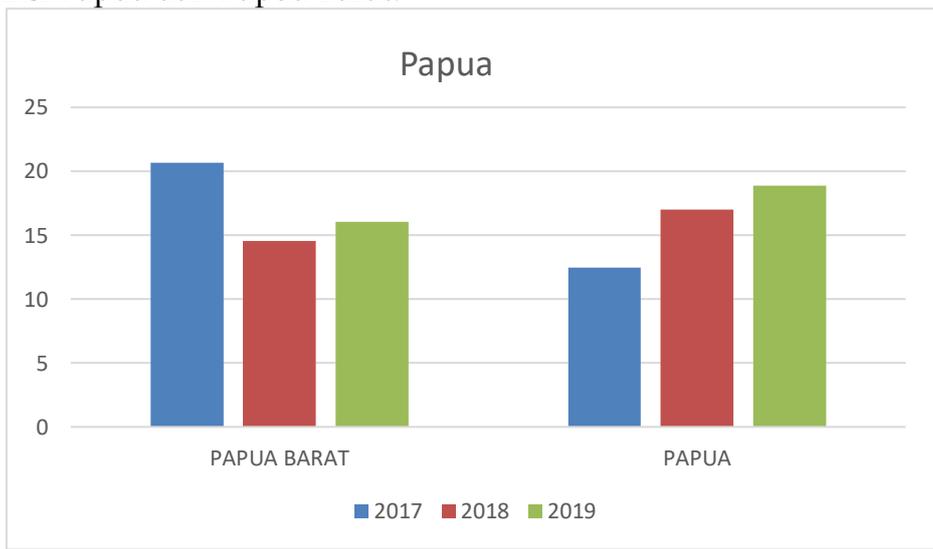
Data infografis permukiman kumuh di Sulawesi terlihat pada Gambar 6 yang terdiri dari beberapa Provinsi diantaranya Sulawesi Tengah, Utara, Barat, Selatan dan Tenggara.



Gambar 6 Data Infografis Permukiman Kumuh di Sulawesi
 Sumber: bps.go.id

Berdasarkan pada Gambar 6 terlihat beberapa pertumbuhan permukiman kumuh di beberapa wilayah di Sulawesi masih banyak terjadi pada tahun 2019 dengan angka sebesar 17.08 yang terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah.

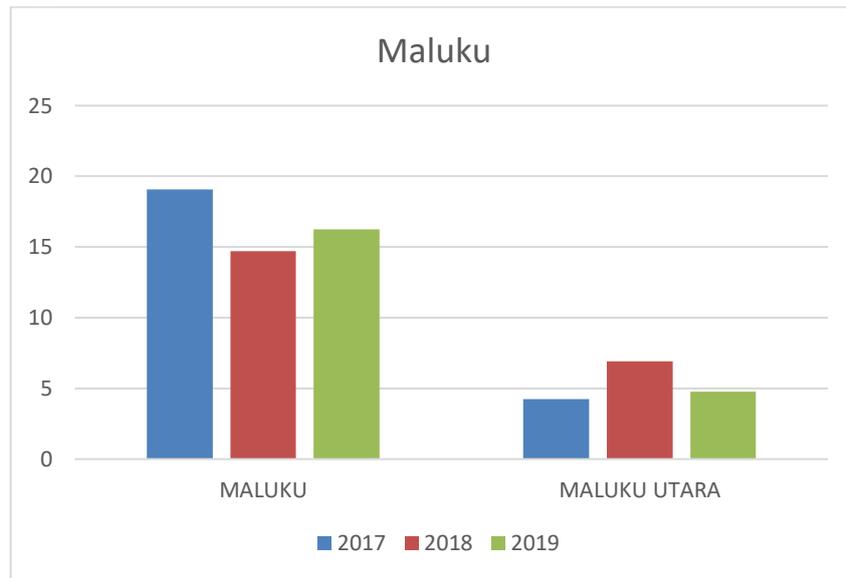
Data infografis permukiman kumuh Papua terlihat pada Gambar 7 yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat.



Gambar 7. Data Infografis Permukiman Kumuh di Papua
 Sumber: bps.go.id

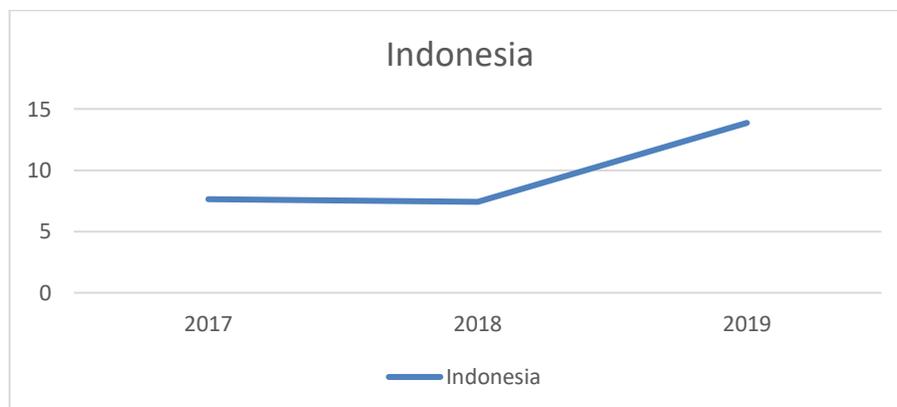
Pertumbuhan permukiman kumuh juga terdapat pada Papua berdasarkan dengan data tahun 2017 sebesar 12.48 tumbuh menjadi 18.89 pada tahun 2019 sehingga terlihat memang pertumbuhan permukiman kumuh belum mampu diatasi oleh pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan hal ini dirasakan karena kurangnya sinergi yang optimal antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta lingkungan masyarakat.

Pemukiman kumuh pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara terlihat seperti pada Gambar 8.



Gambar 8 Data Infografis Permukiman Kumuh Maluku
Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data pertumbuhan permukiman kumuh Maluku dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara dimana proses pertumbuhan permukiman kumuh lebih banyak terjadi pada Provinsi Maluku dengan angka pada tahun 2019 sebesar 16.26 sementara pada Maluku Utara pertumbuhan hanya mencapai 4.76. Berdasarkan beberapa data permukiman kumuh yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia maka, permasalahan permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan dengan prioritas penanganan yang harus dilakukan mulai dari melakukan edukasi, sinergi serta melibatkan beberapa pihak mulai dari pemerintah kota, masyarakat serta instansi terkait untuk dapat memberikan edukasi dan pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman kumuh.



Gambar 9. Data Infografis Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia
Sumber: bps.go.id

Terlihat pada Gambar 9 bahwa penekanan pertumbuhan permukiman kumuh belum bisa dilakukan secara signifikan hal ini terlihat pertumbuhan dari setiap tahun, jejaring kebijakan yang dikeluarkan dalam pengawasan dan pengendalian

pemukiman kumuh di Indonesia sepertinya belum optimal dilakukan. Penekanan terhadap angka pemukiman kumuh sulit dilakukan jika tidak ada sinergi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa data permukiman kumuh yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia maka, permasalahan pemukiman kumuh masih menjadi pekerjaan dengan prioritas penanganan yang harus dilakukan mulai dari melakukan edukasi pada masyarakat, sinergi serta melibatkan beberapa pihak mulai dari pemerintah kota, masyarakat serta instansi terkait untuk dapat memberikan edukasi dan pengawasan terhadap pertumbuhan pemukiman kumuh

D. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perkampungan kumuh di Indonesia dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan Indonesia masih terus meningkat berdasarkan data tahun 2017-2019 yaitu terjadi peningkatan mencapai 13.86% karena kurangnya sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat serta belum adanya keterlibatan peran lembaga keamanan terkait penyelesaian masalah sosial karena masih adanya kriminalitas di kampung kumuh. Rumah tangga di permukiman kumuh tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Pembangunan sistem drainase masih rendah standar kehidupan layak di lingkungan perkotaan, karena tidak disertai dengan tindakan pengelolaan air yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Jurnal

- Alfian. (2014). Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2453-2464. <https://adoc.pub/peran-dinas-cipta-karya-dan-tata-kota-dalam-penataan-perumah.html>
- Budiastini, N. P. D. (2015). Analisis Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kampung Bugis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(2), 34-39.
- Dalilah, A., & Ridwana, R. (2019). Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(2), 71. <https://doi.org/10.23887/jiis.v5i2.21773>
- Elviyanti, E., Aryanti, D., & Andika, S. (2020). Arah Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 7(1), 53. <https://doi.org/10.31258/dli.7.1.p.53-57>
- Ervianto, W. I. (2019). Di Perkotaan Sustainable Urban Slums Management. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178-186.
- Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1). <https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.11888>
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Indrayati, A. (2011). Pola Distribusi Keruangan Mck Komunal Dan Hubungannya Dengan Kawasan Kumuh Di Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 8(1), 54-63. <https://doi.org/10.15294/jg.v8i1.1656>
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa-Kota*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>

- Kusumaningsih, S., Astuti, W., & Fitria, E. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat. *Desa-Kota*, 1(1), 14-23.
<http://jurnal.uns.ac.id/jdk>
- Kusumastuti, K., Miladan, N., Istanabi, T., Suminar, L., Yudana, G., Aliyah, I., Soedwiwahjono, S., Pamardhi-Utomo, R., Werdiningtyas, R., & Putra, R. P. (2021). Peran Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Penataan Kampung Yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kampung Ngemplak, Jebres, Kota Surakarta). *Desa-Kota*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i2.45466.171-178>
- Ramadhanti, N. D., Astuti, W., & Putri, R. A. (2021). Dampak Tpa Putri Cempo Terhadap Permukiman. *Desa-Kota*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i2.48352.103-121>
- Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.31258/dli.4.2.p.117-127>
- Ridlo, M. A. (2020). Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 150.
<https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.12790>
- Satrio, M. I., & Sukmawati, A. M. (2021). Kebertahanan Masyarakat Pada Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi Di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. *Desa-Kota*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.43694.36-48>
- Suharini, E. (2007). Menemukenali Agihan Permukiman Kumuh Di Perkotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh. *Jurnal Geografi*, 4(2), 77-85.
<https://doi.org/10.15294/jg.v4i2.100>
- Wardani, Y. K., Herwangi, Y., & Sarwadi, A. (2019). Peran Struktur Sosial dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(1), 1-20. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i1.215>
- Wicaksono, R., Hardiana, A., & Mukaromah, H. (2021). Rumah Deret Dan Kriteria Berkelanjutan Di Kota Surakarta. *Desa-Kota*, 3(1), 92.
<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.35112.92-102>
- Zulkarnaini, W. R., Elfindri, E., & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*, 16(2), 169. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047>